



STRATEGI PENDANAAN RANCANGAN TEKNOKRATIK RPJMN 2020-2024

DEPUTI BIDANG PENDANAAN PEMBANGUNAN

BALIKPAPAN, 20 AGUSTUS 2019





KEBUTUHAN PENDANAN RPJMN 2020-2024

- Indikasi kebutuhan untuk 7 Agenda Pembangunan mencapai **Rp 24.214,5 T**
- Diperkirakan Belanja KL hanya mampu mendanai **20-25%** dari kebutuhan

Agenda Pembangunan	TOTAL (Rp. Triliun)
Perkuatan Ketahanan Ekonomi	939,4
Pengembangan Wilayah	2.857,5
Peningkatan Kualitas SDM	16.954,6
Kebudayaan dan Karakter Bangsa	30,3
Perkuatan Infrastruktur	2.611,2
Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	407,2
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	414,3
TOTAL	24.214,5

Keterangan:

- Masih merupakan angka sementara



STRATEGI PENDANAAN RPJMN 2020-2024

Memperkuat implementasi *Money Follow Program* dengan 3 strategi utama :

1 Memperkuat Kualitas Alokasi Pada Prioritas

- Memperkuat integrasi pendanaan untuk prioritas
- Fokus pada pendanaan prioritas khususnya *Major Project*

2 Memperbesar Kapasitas Pendanaan

- Diperkirakan Belanja K/L hanya dapat mendanai 20-25% seluruh kebutuhan pembangunan
- Mendorong peran Daerah, BUMN, KPBU, Masyarakat
- Mendorong inovasi skema pendanaan (*creative financing*) antara lain PINA, *Blended Finance* serta *Output Based Transfer*/Hibah ke daerah

3 Memperkuat *Delivery Mechanism*

- Menyusun rencana program pembangunan hingga tingkat proyek dan *Major Project* sebagai alat kendali



MAJOR PROJECT RPJMN 2020-2024

- Pelaksanaan RT RPJMN 2020-2020 diperkuat penyusunan *Major Project* 2020-2024 untuk memperkuat fokus dan pengendalian program (*delivery mechanism*)
- *Major Project* memuat proyek-proyek strategis yang terintegrasi dengan melibatkan K/L; Pusat – Daerah – BUMN – Masyarakat

MAJOR PROJECT a.l.



Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting



Penyelesaian Kawasan Pariwisata
(Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo, dan Wakatobi)



Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0



Pembangunan Tol Sumatera & Trans Papua



Pengembangan Wilayah Metropolitan
(Palembang, Banjarmasin, Makassar, dan Denpasar)

38 Major Project disusun memiliki **Nilai Strategis** dan **Daya Ungkit** Untuk Mencapai Sasaran Prioritas





HIGHLIGHT MAJOR PROJECT P. KALIMANTAN

- Pengembangan Wilayah Metropolitan :
a.l. Banjarmasin
- Pengembangan Ekonomi Kawasan Perbatasan Negara: a.l. Paloh-Aruk dan Nunukan
- Pengembangan Jaringan 7 Pelabuhan Terpadu:
a.l. Kijing / Pontianak
- Pembangunan 10 Juta Sambungan Rumah
- Proyek Revitalisasi kilang minyak (Balikpapan) dan pembangunan 2 kilang baru (Tuban dan Bontang)
- Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0



PERKUATAN KUALITAS DAN KAPASITAS PENDANAAN

Belanja K/L dan Transfer Ke Daerah

Belanja K/L



Pengembangan Daerah Tertinggal, Terdepan dan Terluar (pemerataan)



Mendorong Pusat Pertumbuhan Dengan Memperhatikan aspek kewilayahan

Daerah



Mengimplementasikan pendanaan kebutuhan **Standar Pelayanan Minimum (SPM)** secara bertahap sebagai komponen dalam perhitungan transfer ke daerah.



Mengimplementasikan secara bertahap prinsip-prinsip **output based transfer** dalam transfer ke daerah (berdasarkan kinerja).

DESAIN DANA TRANSFER KHUSUS (DAK)

1 REGULER

- Mendukung pelayanan publik mendasar
- Bidang tetap dalam 5 tahun
- Mengadung aspek pemerataan
- Bersifat *Bottom-Up*

2 PENUGASAN

- Menangani isu-isu tematik nasional (Prioritas/isu sektor maupun kewilayahan)
- Penugasan dapat berganti sesuai penekanan RKP
- Memiliki target waktu penyelesaian
- Bersifat *Top-Down*

1 REGULER



Pendidikan



Sanitasi



Kesehatan



Perumahan &
Permukiman



Air Minum



Jalan

2 PENUGASAN

Afirmasi Pembangunan

Ketahanan Pangan dan
Pembangunan Berkelanjutan

Penyelesaian Stunting

Pengembangan 10 Destinasi
Pariwisata

Pendidikan Vokasi & UMKM

Perlindungan Sosial

Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Daerah Terdampak Bencana

Catatan: Bidang merupakan pemikiran awal (tentatif)



MENDORONG KERJASAMA PEMERINTAH-BADAN USAHA (KPBU)

- Merupakan Pengelolaan Aset Melalui Konsesi Dengan Badan Usaha (Bukan Privatisasi).
- Diusulkan Oleh Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Dan BUMN.
- Proses KPBU Dilaksanakan Rata-rata 1-3 Tahun. Bappenas Mendampingi Dan Membantu Proses Persiapan (Sekretaris Kantor Bersama).
- Bentuk KPBU :
 1. Pembayaran Oleh Pengguna Dalam Bentuk Tarif (*User Charge*).
 2. Pembayaran Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*).
 3. Bentuk lainnya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

CAKUPAN PROYEK KPBU

19 SEKTOR INFRASTRUKTUR KPBU:

KONEKTIVITAS

- Transportasi
- Jalan
- Ketenagalistrikan
- Migas dan EBT
- Konservasi Energi
- Telekomunikasi dan informatika

FASILITAS PERKOTAAN

- Air Minum
- Pengelolaan Limbah Setempat
- Pengelolaan Limbah Terpusat
- Pengelolaan Sampah
- SDA & Irigasi
- Fasilitas Perkotaan
- Perumahan Rakyat

FASILITAS SOSIAL

- Pariwisata
- Fasilitas Pendidikan
- Lembaga Permasalahan
- Sarana Olah Raga, Kesenian dan Budaya
- Kawasan
- Kesehatan



Beberapa Contoh Proyek KPBU di Kalimantan

Konektivitas

- Bandara Singkawang
- Bandara Tarakan
- Jalan Tol Balikpapan-Samarinda
- Jalan Tol Balikpapan - Penajam Paser Utara
- Jalan Tol Samarinda-Bontang

SDM

- Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Tengah

PENEKANAN PENDANAAN

ARAHAN PRESIDEN

Pembangunan Infrastruktur

Menyambungkan **infrastruktur besar** dengan **kawasan-kawasan produksi rakyat: kawasan industri kecil, Kawasan Ekonomi Khusus, kawasan pariwisata**, kawasan persawahan, kawasan perkebunan, dan tambak-tambak perikanan

Pembangunan SDM

Menjamin kesehatan ibu hamil, bayi, balita, anak usia sekolah, **penurunan stunting-kematian ibu & bayi**, peningkatan kualitas pendidikan, **vokasi**, manajemen talenta, dan dukungan bagi diaspora bertalenta tinggi

Mendorong Investasi

Memangkas **perizinan**, pungli dan hambatan investasi lainnya

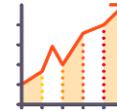
Reformasi Birokrasi

Reformasi struktural agar lembaga semakin sederhana, semakin simple, semakin lincah, mindset berubah, kecepatan melayani, kecepatan memberikan izin, efisiensi lembaga

Penggunaan APBN

Menjamin penggunaan APBN yang **fokus dan tepat sasaran**.

7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024



Memperkuat **Ketahanan Ekonomi** untuk Pertumbuhan yang Berkualitas



Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan



Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing



Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan



Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan **Pelayanan Dasar**



Membangun **Lingkungan Hidup**, Meningkatkan **Ketahanan Bencana** dan Perubahan Iklim



Memperkuat **Stabilitas** Polhukhankam dan **Transformasi** Pelayanan Publik

*) Disampaikan pada pidato Visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat



PENEKANAN PENDANAAN

1 MENDORONG PERTUMBUHAN



- Pembangunan infrastruktur mendukung **Pariwisata dan sektor unggulan**
- **Modernisasi Industri** nasional
- Penguatan **Ekonomi Kreatif** dan digital
- Pendidikan dan Pelatihan **Vokasi**

2 MEMBANGUN SDM



- Penguatan **Bantuan Sosial** dan subsidi yang tepat sasaran
- Peningkatan kualitas **Pendidikan dan Kesehatan**
- Akses dan kualitas **Air Minum** dan **Sanitasi** layak

3 MEMPERKUAT STABILITAS DAN MITIGASI BENCANA



- Penguatan **Pertahanan** dan **Keamanan**
- Peningkatan tata kelola **Lingkungan** dan **Kebencanaan**



MENDORONG PERTUMBUHAN

➤ PARIWISATA, INDUSTRI & EKONOMI KREATIF

Pembangunan “10” Bali baru dan Kawasan industri melalui:



Peningkatan konektivitas jaringan jalan di KemPUPR dan konektivitas transportasi intermoda (Laut, KA, Udara) di Kemenhub



Melanjutkan dukungan **promosi dan penyiapan destinasi**



Pengembangan **Kawasan Industri**, **Penerapan Industri 4.0** di KemPerin serta dukungan pengembangan **Ekonomi Kreatif**



Reformasi pelayanan dan perijinan

➤ DUKUNGAN SDM : VOKASI



Melanjutkan pendanaan **Program Vokasi** melalui :

- Melanjutkan program vokasi pada BLK, Politeknik dan SMK
- Pemagangan siswa dalam negeri dan luar negeri



Pendanaan infrastruktur khususnya konektivitas direncanakan meningkat lebih dari 50% dibandingkan APBN 2015-2019.

*) Merupakan angka perkiraan dengan memperhitungkan sumber pendanaan lainnya



MEMBANGUN MANUSIA

➤ PENGUATAN BANTUAN SOSIAL

- 1 Melanjutkan kebijakan 2015 – 2019 seperti PKH di Kemsos, JKN/KIS di Kemenkes & KIP Sekolah/Madrasah di Kemdikbud & Kemenag
- 2 Kebijakan baru seperti **Kartu Prakerja**, **Kartu Sembako Murah**, **KIP-Kuliah**



*Program Bantuan Sosial diperkirakan naik **100%** untuk melanjutkan Kebijakan 2015-2019 & kebijakan baru*

➤ PELAYANAN DASAR



Peningkatan akses dan kualitas **Air Minum & Sanitasi** di KemPUPRA



Diperkuat melalui sinergi program penyediaan perumahan



Peningkatan pendanaan DAK Air Minum, Sanitasi, dan Perkim serta hibah daerah.



Perlu disiapkan kapasitas pelaksanaan dan dukungan Pemda



*Program Air minum dan Sanitasi diperkirakan naik **50%***

*) Merupakan angka perkiraan dengan memperhitungkan sumber pendanaan lainnya



MEMPERKUAT STABILITAS DAN MITIGASI BENCANA

➤ PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN DAN KEAMANAN



- 1 Peningkatan anggaran untuk K/L terkait pertahanan dan keamanan khususnya meningkatkan pemenuhan MEF melalui sumber-sumber pendanaan non-Rupiah.
- 2 Penguatan keamanan siber.

➤ PENINGKATAN KUALITAS LINGKUNGAN DAN MITIGASI BENCANA



- 1 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui rehabilitasi hutan dan lahan.
- 2 Mendorong penguatan pendanaan mitigasi dan penanggulangan bencana di KLHK, BMKG, BNPB.
- 3 Dukungan pengembangan teknologi lingkungan dan kebencanaan di BPPT, LAPAN, LIPI.

KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT



KESIMPULAN DAN TINDAK LANJUT

1. Pemerintah Pusat dan Daerah perlu mendorong kreativitas dalam menggali sumber-sumber pendanaan baru seperti Kerjasama Pusat dan Daerah, BUMN, Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Masyarakat
2. Melakukan koordinasi dengan Bappenas:
 - a. Memastikan kesiapan pelaksanaan *Major Project*
 - b. Melakukan sinergi kegiatan di daerah untuk mendukung pelaksanaan *Major Project*

TERIMA KASIH
